

ABSTRAK

Azminur Naila Najah: Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Jaminan Asuransi Kesehatan di BPJS Kesehatan Bandung

Sehubungan dengan Putusan dan Rekomendasi Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan bersepakat untuk mengklarifikasi isu haram yang berkembang di masyarakat dan agar pemerintah membentuk aturan dan sistem BPJS Kesehatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan pertimbangan itu, maka pada tanggal 22 Desember 2015 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia memutuskan dan menetapkan Fatwa DSN-MUI No.98/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan Jaminan Asuransi Kesehatan di BPJS Kesehatan Bandung juga mengetahui sinkronisasinya dengan Fatwa DSN-MUI No.98/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah, sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam hal penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan.

Metode yang diterapkan dalam penelitian kualitatif ini adalah metode deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian, yang datanya didapatkan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan.

Prinsip asuransi syariah berbeda dengan prinsip asuransi pada umumnya. Tiga prinsip utama asuransi syariah adalah saling bertanggung jawab, saling bekerja sama atau saling membantu, dan saling melindungi penderitaan satu sama lainnya. Tiga prinsip utama asuransi syariah ini sudah sejalan dengan prinsip BPJS Kesehatan yaitu kegotongroyongan. Beberapa ketentuan terkait asuransi syariah yang juga dijalankan di BPJS Kesehatan diantaranya yaitu ketentuan *Sharing of Risk* dimana terjadi proses saling menanggung (*ta'awun*), adanya pemisahan dana, yaitu dana *tabarru'* dan dana operasional.

Pelaksanaan jaminan asuransi kesehatan di BPJS Kesehatan Bandung baik dari segi kepesertaan, iuran, layanan, dan denda telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, namun tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN-MUI No.98/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah, karena belum memenuhi semua unsur akadnya, belum memiliki rekening penampungan DJS di Bank Syariah, memperoleh pendapatan dari bunga, alur pengembangan dan penempatan DJS belum jelas dan investasinya bukan ditempatkan investasi yang sesuai dengan syariah.